

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SKPD Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan SKPD Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas keuangan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

SKPD Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes mempunyai kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan SKPD Dinas Arsip Dan Perpustakaan Kabupaten Brebes secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada SKPD Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban SKPD Dinas Arsip dan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna Laporan Keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SKPD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas akuntansi.

Tujuan umum Laporan Keuangan SKPD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi entitas pelaporan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Brebes dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah dan para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan spesifik Laporan Keuangan SKPD Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2) menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPD Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) menyediakan informasi mengenai bagaimana SKPD Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi SKPD Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan retribusi;
- 6) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana SKPD Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan Keuangan ini terdiri dari :

- a) Laporan Realisasi Anggaran ;
- b) Neraca ;
- c) Laporan Operasional ;
- d) Laporan Perubahan Ekuitas;
- e) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Pendapatan;
- b) Belanja;
- c) Transfer ;
- d) Surplus/Defisit ;
- e) Pembiayaan ;
- f) Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran

Neraca

Neraca SKPD Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Kami mengklasifikasikan aset dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Kami mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima kembali atau dibayar kembali dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

- a) Kas dan setara kas ;
- b) Investasi jangka pendek ;
- c) Piutang pajak dan bukan pajak ;
- d) Persediaan ;
- e) Investasi jangka panjang ;
- f) Aset tetap ;
- g) Kewajiban jangka pendek ;
- h) Kewajiban jangka panjang ;
- i) Ekuitas.

Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO), yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut :

- a) Pendapatan-LO dari Kegiatan Operasional;
- b) Beban dari Kegiatan Operasional;
- c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional;
- d) Surplus/defisit-LO

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Kinerja APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor ...Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019 ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor ... Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes NomorTahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018;
29. Peraturan Bupati Brebes Nomor... Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018;
30. Peraturan Bupati Brebes Nomor Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019;
31. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes NomorTahun 2019 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai Peraturan Bupati Brebes Nomor 062 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan disusun adalah sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan		
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD	
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD	
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD	
Bab II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD		
	2.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD	
	2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	
Bab III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD		
	3.1	LRA	
		3.1.1	Pendapatan_LRA
		3.1.2	Belanja
	3.2	LO	

		3.2.1	Pendapatan -LO
		3.2.2	Beban
		3.2.3	Kegiatan Non Operasional
		3.2.4	Pos Luar Biasa
	3.3	Laporan Perubahan Ekuitas	
		3.3.1	Perubahan Ekuitas
	3.4	Neraca	
		3.4.1	Aset
		3.4.2	Kewajiban
		3.4.3	Ekuitas
	3.5	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang rnenggunakan basis akrual pada Pemda.	
Bab IV	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD		
Bab V	Penutup		

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian target Kinerja APBD. Target kinerja APBD tersebut merupakan gambaran realisasi pencapaian efektif dan efisien pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019.

Untuk memberikan gambaran secara jelas ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel bawah ini :

a. Tabel pencapaian target dan realisasi pendapatan

NO	URAIAN JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	Pajak	Nihil			
2	Pajak				
3	Retribusi				
4	Retribusidll				

Kinerja mengenai anggaran pendapatan dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi pendapatan sebesar Rp..... dari target yang ditetapkan Rp..... atau%.
2. Realisasi pendapatan lebih/(kurang) dari anggaran disebabkan

b. Tabel pencapaian target dan realisasi belanja

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	Belanja Pegawai	2.574.935.000	2.328.009.920	(246.925.080)	90,41
2	Belanja Barang dan Jasa	1.701.062.000	1.681.352.649	(19.709.351)	98,84
3	Belanja Modal	412.500.000	406.105.000	(6.395.000)	98,45
	Jumlah	4.688.497.000	4.415.467.569	(273.029.431)	94,18

Kinerja mengenai anggaran pendapatan dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 2.328.009.920 dari target yang ditetapkan Rp 2.574.935.000 atau 90,41 %.

2. Realisasi Belanja Brg Jasa sebesar Rp 1.681.352.649 dari target yang ditetapkan Rp 1.701.062.000 atau 98,84%.
3. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp 406.105.000 dari target yang ditetapkan Rp 412.500.000 atau 98,45%.

Secara keseluruhan realisasi belanja mencapai 94,18 % dari yang dianggarkan dikarenakan adanya efisiensi dan belanja tidak langsung yang tidak terserap semua.

1.4. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN SKPD

PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

3.1.1 Pendapatan

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar lagi oleh daerah. Ikhtisar Pendapatan Daerah yang dikelola oleh SKPD Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

Pendapatan Daerah	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Nihil			
b. Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan				
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah				
Jumlah				

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2018, maka realisasi pendapatan yang dikelola SKPD Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes Tahun 2019 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp..... atau%.

Realisasi masing-masing Pendapatan Daerah dapat dijelaskan pada uraian dibawah ini:

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola SKPD Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes setelah Perubahan Anggaran ditargetkan sebesar Rp..... Realisasi sebesar Rp..... atau%. Realisasi secara rinci dengan komposisi sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
a. Pajak Daerah	Nihil			
b. Retribusi daerah				
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah				
d. Lain-Lain PAD yang sah				
Jumlah				

1) Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi pendapatan dari pajak daerah kurang/melebihi target sebesar% atau realisasi mencapai Rp.....

Realisasi secara rinci dapat dirinci sebagai berikut :

Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
a. Pajak Hotel				
Hotel Melati III				
Hotel Melati II				
Hotel Melati I				
Losmen				
b. Pajak Restoran				
Restoran				
Rumah Makan				
c. Pajak Hiburan				
Bioskop				
Pagelaran Seni				
Arena Bilyard				
Hiburan Insedentil				
Permainan Ketangkasan				
Pertandingan				
Kolam Renang				
d. Pajak Reklame				
Papan/Bilboard/Megatron				
Kain				
Melekat/Stiker				
Reklame Selebatan				
e. Pajak Penerangan Jalan				
f. Pajak Bahan Galian C				
Batu Pecahan				
Pasir				
Batu Belah				
g. Pajak Sarang Burung Walet				
h. Pajak Air Bawah Tanah				
i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan				
Jumlah				

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah yang dikelola SKPD Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes dapat terealisasi Rp.....atau% dari target sebesar Rp. sebagaimana rincian berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
a. Pelayanan Kesehatan	Nihil			
b. Pelayanan Persampahan/Kebersihan				
c. Penggantian Biaya Cetak KTP/KK				
d. Parkir di Tepi Jalan Umum				
e. Pelayanan Pasar				
f. Pengujian Kendaraan Bermotor				
g. Pemakain Kekayaan Daerah				
h. Tempat Pelelangan				
i. Terminal				
j. Tempat Khusus Parkir				

k. Tempat Penginapan/Pesanggrahan				
l. Rumah Potong Hewan				
m. Pelayanan Kepelabuhan				
n. Tempat Rekreasi dan Olahraga				
o. Penjualan Prod Usaha Daerah				
p. Penutupan Jalan				
q. Ijin Mendirikan Bangunan				
r. Ijin Gangguan /Keramaian				
s. Ijin Trayek				
t. Ijin Jasa Konstruksi				
u. Ijin penebangan pohon jati				
v. Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)				
w. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)				
x. Tanda Daftar Industri (TDI)				
y. Ijin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan				
z. Ijin Pengangkutan hasil Hutan				
Jumlah				

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebesar Rp.....dari yang direncanakan sebesar Rp.....dengan rincian sebagai berikut :

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
a. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah				
PD Air Minum (PDAM)	Nihil			
PD Perbengkelan				
PD Percetakan				
PD Farmasi				
b. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank				
PT. Bank Jateng				
PD Bank Puspakencana				
BKK Banjarharjo				
BKK Brebes				
c. Bagian Laba Penyertaan Pihak Ketiga				
Dana Bergulir-Usaha Koperasi				
Dana Bergulir-Usaha Pertanian				
Dana Bergulir-Usaha Peternakan				
Dana Bergulir-Usaha Perikanan				
Jumlah				

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah sebesar Rp.....dari yang direncanakan sebesar Rp.....atau% dengan rincian sebagai berikut :

Lain-Lain PAD yang Sah :	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
a. Hasil Penj Aset Yang Tdk Dipisahkan				
Penjualan Drum Bekas	Nihil			
Penjualan Bongkaran Proyek				
b. Jasa Giro Kas Daerah				

Lain-Lain PAD yang Sah :	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
c. Bunga Deposito				
Deposito pada BPD Jateng				
Deposito pada Bank Mandiri				
Deposito pada BRI				
Deposito pada Bank Bukopin				
Deposito pada BPR/BKK				
Deposito pada BTPN				
Deposito pada Bank Muamalat				
d. Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah				
e. Denda Keterlambatan Pel Pekerja				
f. Penerimaan Lain-lain				
g. Kompensasi Sumber Air Kaligiri				
h. Penerimaan Pabrik Gula				
i. Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah				
Jumlah				

3.1.2 Belanja

Belanja Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2019 yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah, meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran sebesar Rp **4.415.467.569** dari anggaran Rp **4.688.497.000** dengan perincian sebagai berikut :

Belanja :	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
a. Belanja Operasi (BO)	4.275.997.000	4.009.362.569	93,76	3.251.128.882
b. Belanja Modal (BM)	412.500.000	406.105.000	98,45	332.266.330
c. Belanja Tak Terduga (BTT)				
d. Belanja Transfer (BT)				
Jumlah	4.688.497.000	4.415.467.569	94,18	3.583.395.212

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja modal. Dalam Tahun Anggaran 2019 SKPD Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes merealisasikan belanja operasi sebesar Rp **4.009.362.569** dari anggaran sebesar Rp **4.275.997.000** Komposisi realisasi belanja operasi sebagai berikut :

Belanja Operasi :	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
a. Belanja Pegawai	2.574.935.000	2.328.009.920	90,41	2.078.371.192
b. Belanja Barang dan Jasa	1.701.062.000	1.681.352.649	98,84	1.172.757.690

c. Belanja Bunga				
d. Belanja Subsidi				
e. Belanja Hibah				
f. Belanja Bantuan Sosial				
g. Belanja Bantuan Keuangan				
Jumlah	4.275.997.000	4.009.362.569	93,76	3.251.128.882

a.Rincian/penjelasan Belanja Pegawai sebagai berikut :

	Belanja Pegawai	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
a.	Gaji dan Tunjangan	1.775.282.000	1.612.392.920	90,82	1.485.099.192
b.	Tambahan Penghasilan PNS	753.215.000	669.950.000	88,95	567.750.000
c.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH				
d.	Biaya Pemungutan Pajak Daerah				
e.	Biaya Pemungutan Retribusi				
f.	Honorarium PNS				
g.	Honorarium Non PNS				
h.	Uang Lembur	46.438.000	45.667.000	98,34	25.522.000
i.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS				
j.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS				
k.	Belanja BLUD				
l.	Belanja BOS				
	Jumlah	2.574.935.000	2.328.009.920	90,41	2.078.371.192

b.Rincian/penjelasan Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut :

	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
a.	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	201.896.000	201.896.000	100	91.207.000
b.	Belanja Bahan/Material	24.505.000	24.105.000	98,37	26.500.000
c.	Belanja Jasa Kantor	350.320.000	341.238.775	97,41	242.517.788
d.	Belanja Premi Asuransi				1.339.400
e.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	127.355.000	122.335.502	96,06	59.651.712
f.	Belanja Cetak dan Penggandaan	161.186.000	161.185.900	100	68.122.200
g.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.600.000	1.600.000	100	12.380.000
h.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000	1.500.000	100	600.000
i.	Belanja Sewa Alat Berat				
j.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.800.000	9.300.000	94,90	1.000.000
k.	Belanja Makanan dan Minuman	109.060.000	106.355.000	97,52	36.566.000

l. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				
m. Belanja Pakaian Kerja				
n. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	11.750.000	11.750.000	100	7.875.000
o. Belanja Perjalanan Dinas	348.540.000	348.036.472	100	224.448.378
p. Belanja Beasiswa Tugas Belajar				
q. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	8.800.000	8.800.000	100	13.070.000
r. Belanja Perjalanan Pindah Tugas				
s. Belanja Pemulangan Pegawai				
t. Belanja Pemeliharaan	47.725.000	47.725.000	100	14.994.500
u. Belanja Honorarium PNS	100.775.000	100.675.000	100	
v. Belanja Honorarium Non PNS	182.100.000	181.500.000	100	
w. Belanja Narasumber/ Tenaga Ahli	14.150.000	13.350.000	94,35	9.520.000
x. Belanja BOS				
J u m l a h	1.701.062.000	1.681.352.649	98,84	809.791.978

- c. Realisasi Belanja Hibah TA 2019 sebesar Rp..... merupakan Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta;

Barang Hibah	Jumlah	(Rp)	Penerima
1. Nihil			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Jumlah			

- d. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2019 sebesar Rp..... merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2019 sebesar Rp..... terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sebesar Rp..... dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp.....

B. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi berupa pengeluaran untuk perolehan aset tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Realisasi belanja modal dalam Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp 406.105.000 dari anggaran sebesar Rp 412.500.000 dengan rincian:

Belanja Modal :	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
a. BM - Tanah				
b. BM - Peralatan & Mesin	228.500.000	223.250.000	97,70	132.850.000
c. BM - Gedung & Bangunan	102.000.000	100.905.000	98,93	104.560.000
d. BM - Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
e. BM - Aset Tetap Lainnya.	82.000.000	81.950.000	99,94	44.875.000
Jumlah	412.500.000	406.105.000	98,45	282.285.000

C. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah belanja yang dialokasikan untuk penanganan akibat dari bencana alam, bencana sosial, dan pelaksanaan kewenangan daerah. Realisasi belanja tak terduga dalam Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp..... dari anggaran sebesar Rp.....

Belanja Tidak Terduga :	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
Belanja Tak Terduga				
Jumlah				

D. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan transfer bagi hasil ke desa yang meliputi bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi. Realisasi Belanja Transfer pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.dari anggaran sebesar Rp.

Belanja Transfer :	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio %	Realisasi 2018
a. Bagi Hasil - Pajak				
b. Bagi Hasil – Retribusi				
Jumlah				

3.1.3 Pembiayaan (khusus untuk SKPKD)

3.2 PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun. Laporan operasional menyajikan pos-pos Pendapatan-LO, Beban, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa.

3.2.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah Kabupaten Brebes yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah

(PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2019 dan 2018.

Pendapatan-LO tahun 2019 adalah sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2019	Tahun 2019		
Pendapatan-LO				
1. Pendapatan Asli Daerah – LO	Nihil			
2. Pendapatan Transfer – LO				
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO				
<i>Jumlah</i>				

1. Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO tahun 2019 adalah sebesar Rp dengan rincian :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2019	Tahun 2018		
1. Pendapatan Asli Daerah-LO				
A. Pendapatan Pajak Daerah - LO	Nihil			
B. Pendapatan Retribusi Daerah - LO				
C. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO				
D. Lain-lain PAD Yang Sah - LO				
<i>Jumlah</i>				

2. Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer – LO tahun 2019 adalah sebesar Rp dengan rincian :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2019	Tahun 2018		
2. Pendapatan Transfer - LO				
A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO				
B. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO				
C. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO				
D. Bantuan Keuangan - LO				
<i>Jumlah</i>				

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO tahun 2019 adalah sebesar Rp 163.073.475.dengan rincian :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2019	Tahun 2018		
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO				
A. Pendapatan Hibah - LO	163.073.475	47.799.100	115.274.375	241,16
B. Dana Darurat - LO				
C. Pendapatan Lainnya - LO				
<i>Jumlah</i>	163.073.475	47.799.100	115.274.375	241,16

A. Rincian Pendapatan Hibah – LO :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2019	Tahun 2018		
A. Pendapatan Hibah - LO				
a. Pendapatan Hibah BEC				
b. Penerimaan Pabrik Gula				
c. Pendapatan Hibah Barang	81.824.700	47.799.100	34.025.600	71,18
d. Pendapatan Hibah Barang	81.248.775	-	81.248.775	
<i>Jumlah</i>	163.073.475	47.799.100	34.025.600	71,18

Penjelasan :

- Pendapatan Hibah berupa barang adalah sebesar Rp 81.824.700 hibah yang diperoleh berupa Buku dari Perpustakaan Nasional
- Pendapatan Hibah berupa barang adalah sebesar Rp 81.248.775 hibah yang diperoleh berupa Buku dan Peralatan Kantor dari Bank Indonesia Corner

B. Rincian Dana Darurat

Dana Darurat tahun 2019 sebesar NIHIL

C. Rincian Pendapatan Lainnya - LO

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2019	Tahun 2018		
C. Pendapatan Lainnya – LO				
a. Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan	Nihil			
b. Dispensasi Kelebihan Muatan				
c. Bantuan dari Pihak ke-3				
d. Tera Ulang				
e. Ijin Usaha Perkebunan				
f. Ijin Usaha Perikanan				
g. Bantuan Retribusi SP3 Kayu				
h. Pendapatan Dana BOS				
Dst....				
<i>Jumlah</i>				

Penjelasan :

- a.
- b.

3.2.2 Beban

Beban dari Kegiatan Operasional adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2019	Tahun 2018		
BEBAN				
A. Beban Operasi	4.351.864.812	3.556.130.118	795.734.694	22,38
B. Beban Transfer				
Jumlah	4.351.864.812	3.556.130.118	795.734.694	22,38

Rincian Beban Operasi sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2019	Tahun 2018		
A. BEBAN OPERASI				
1. Beban Pegawai	2.323.980.045	2.122.960.030	201.020.015	9,47
2. Beban Persediaan	505.302.900	326.753.700	178.549.200	54,64
3. Beban Jasa	657.932.844	455.228.469	202.704.375	44,53
1. Beban Pemeliharaan	170.060.502	124.264.755	45.795.747	36,85
2. Beban Perjalanan Dinas	348.036.472	270.739.484	77.296.988	28,55
3. Beban Bunga				
4. Beban Subsidi				
5. Beban Hibah				
6. Beban Bantuan Sosial				
7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	345.135.404	254.733.680	90.581.724	(99,06)
8. Beban Penyisihan Piutang				
9. Beban Lain-lain	1.236.645	1.450.000	(213.355)	(14,71)
Jumlah	4.351.864.812	3.556.130.118	795.734.694	22,38

- Sesuai Petunjuk Teknis Dana BOS, Dana BOS SD/SMP dipergunakan untuk pengeluaran biaya operasional sebagai berikut:

Kode Kegiatan	Uraian	Kode Rek	Nama Rek	Jumlah

- Adapun rincian penggunaan Dana BOS sebagai berikut :

Rincian Penggunaan Dana BOS SD/SMP	Nilai (Rp)
Jumlah	

3. Beban Hibah

Realisasi Beban Hibah TA 2019 sebesar Rp merupakan Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta termasuk di dalamnya Beban Barang-barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat sebesar Rp Rekap Mutasi Barang yang dihibahkan kepada pihak ke-3 sebagai berikut :

Saldo 2018		Pengadaan 2019		Diserahkan 2019		Reklasifikasi AT		Sisa 2019	
Jml Brg	Jumlah (Rp)	Jml Brg	Jumlah (Rp)	Jml Brg	Jumlah (Rp)	Jml Brg	Jumlah (Rp)	Jml Brg	Jumlah (Rp)
	Nihil		Nihil		Nihil		Nihil		Nihil

4. Beban Penyusutan dan Amortisasi

- Beban penyusutan aset tetap tahun 2019 adalah sebesar Rp (855.029.422) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp (561.503.511)
 - b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp (293.525.911)
 - c. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp
 - d. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Rp
- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2019 sebesar Rp 2.400.000

5. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang tahun 2019 sebesar Rp terdiri dari :

- a. Penyisihan Piutang Pajak Rp
- b. Penyisihan Piutang Retribusi Rp
- c. Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya Rp
- d. Penyisihan Piutang Transfer Rp
- e. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Rp
- f. Penyisihan Piutang BLUD Rp
- g. Penyisihan Bag. Lancar TP-TGR Rp
- h. Penyisihan Piutang Lain-lain Rp

3.2.3 Kegiatan Non Operasional

Rincian Kegiatan Non Operasional sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan	%
	Tahun 2019	Tahun 2018	/(Penuruna)	
SURPLUS NON OPERASIONAL - LO				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO				
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO				
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	469.201.594		469.201.594	0
JUMLAH	469.201.594		469.201.594	0
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO		1.012.500	(1.012.500)	(100)
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO				
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	131.200.000	245.558.200	(114.358.200)	(46,57)
JUMLAH	131.200.000	246.570.700	(115.370.700)	(46,79)
SURPLUS DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL - LO	338.001.594	(246.570.700)	584.572.294	(237,08)

Penjelasan :

1. Pada tahun 2019 dilaksanakan penghapusan. Adapun barang yang berstatus rusak berat yang telah dihapus sebesar Rp dengan Berita Acara Penghapusan Nomor
2. Barang-barang yang telah dihapus tersebut telah dijual dengan nilai buku Rp dan penerimaan kas daerah atas penjualan sebesar Rp Selisih atas nilai jual terhadap nilai buku dicatat sebagai *)Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO sebesar Rp

3.2.4. Pos Luar Biasa

Pendapatan dari Pos Luar Biasa sebesar Rp dan Beban dari Pos Luar Biasa sebesar Rp

3.3 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitasTA 2019 dibandingkan dengan TA 2018.

Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp 3.965.418.012 berasal dari saldo awal Ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp 3.605.854.246 ditambah Surplus-LO TA 2019 sebesar Rp 3.850.789.743 dikurangi koreksi ekuitas TA 2019 sebesar Rp 205.114.060 ditambah Kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar RP. 4.415.467.569 Rincian Koreksi Ekuitas sebagai berikut :

Uraian	2019(Rp)	2018(Rp)
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Koreksi Nilai Kas		
Koreksi Nilai Piutang		
Koreksi Nilai Penyisihan Piutang		
Koreksi Beban Dibayar di Muka		
Koreksi investasi		
Koreksi Nilai Tanah		(6.270.027.000)
Koreksi Nilai Peralatan dan Mesin		128.074.285
Koreksi Nilai Gedung dan Bangunan		
Koreksi Nilai Jalan Irigasi dan Jaringan		
Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya		
Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan	(293.804.060)	
Koreksi Nilai Aset Lainnya		
Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka		
Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya		
Koreksi Utang Belanja		(2.111.162)
Koreksi Mutasi SKPD Aset Tetap		106.274.000
Koreksi Awal Aset Tetap	88.690.000	7.288.802.000
Koreksi Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		4.255.673,99
Koreksi Awal Aset Lain-lain		
Koreksi Awal Penyusutan Aset Lain-lain		
Koreksi Mutasi SKPD Aset Lainnya		3.583.395.212
Jumlah	(205.114.060)	4.834.407.335

Penjelasan :

1. Koreksi Nilai Persediaan, merupakan :
 - a.
 - b.
2. Selisih Revaluasi Aset Tetap, merupakan :
 - a.
 - b.
3. Koreksi Nilai Kas, merupakan :
 - a.
 - b.
4. Koreksi Nilai Piutang, merupakan :
 - a.
 - b.
5. Koreksi Nilai Penyisihan Piutang, merupakan :

- a.
- b.
- 6. Koreksi Nilai Beban Dibayar di Muka, merupakan :
 - a.
 - b.
- 7. Koreksi Nilai Investasi, merupakan :
 - a.
 - b.
- 8. Koreksi Nilai Tanah, merupakan :
 - a. Koreksi penyesuaian tanah Rp
 - b.
- 9. Koreksi Nilai Peralatan Mesin, merupakan :
 - a. Koreksi penyesuaian tanah Rp
 - b.
- 10. Koreksi Nilai Gedung dan Bangunan, merupakan :
 - a. Koreksi penyesuaian gedung dan bangunan Rp
 - b.
- 11. Koreksi Nilai Jalan Irigasi dan Jaringan, merupakan :
 - a. Koreksi penyesuaian jalan irigasi dan jaringan Rp
 - b.
- 12. Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya, merupakan :
 - a. Koreksi penyesuaian Aset Tetap Lainnya Rp
 - b.
- 13. Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, merupakan :
 - a. Koreksi nilai akumulasi penyusutan 2019 sebesar Rp. 293.804.060
 - b.
- 14. Koreksi Nilai Aset Lainnya, merupakan :
 - a.
 - b.
- 15. Koreksi Nilai Pendapatan di Muka, merupakan :
 - a.
 - b.
- 16. Koreksi Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya, merupakan :
 - a.
 - b.
- 17. Koreksi Nilai Utang Belanja, merupakan :
 - a.
 - b.
- 18. Koreksi Mutasi SKPD Aset Tetap, merupakan :
- 19. Koreksi Awal Aset Tetap, merupakan :
 - a. Koreksi mutasi masuk yang tidak tercatat di aset tetap tahun 2019
Rp. 109.900.000

- b. Koreksi penghapusan mutasi masuk aset tetap tahun 2019
Rp. 21.210.000
- 20. Koreksi Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, merupakan :
 - a.
 - b.
- 20. Koreksi Awal Aset Lain-lain, merupakan :
 - a.
 - b.
- 21. Koreksi Awal Penyusutan Aset Lain-lain, merupakan :
 - a.
 - b.
- 22. Koreksi Mutasi SKPD Aset Lainnya, merupakan :
 - a.
 - b.

3.4 PENJELASAN POS-POS NERACA

3.4.1 ASET

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	Th. 2019	Th. 2018
Aset Lancar	1.244.000	1.255.000
Aset Tetap	4.166.188.720	3.652.756.890
Aset Lainnya	3.600.000	6.000.000
Jumlah Aset	4.171.032.720	3.660.011.890
Kewajiban	50.096.838	54.157.644
Ekuitas	3.714.830.882	3.605.854.246
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas	3.764.927.720	3.660.011.890

A. Aset Lancar

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Th. 2019	Th. 2018
Kas		
Piutang		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		
Persediaan	1.244.000	1.255.000

Uraian	Th. 2019	Th. 2018
Beban Dibayar Dimuka		
Jumlah Aset Lancar	-	-

1. Kas

Saldo kas terdiri atas Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di JKN dan Kas Lainnya dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Th. 2019	Th. 2018
Kas	Nihil	Nihil
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas BLUD		
Kas di JKN		
Kas di Bendahara FKTP		
Kas di Bendahara BOS		
Kas Lainnya (Kas BOS)		
Jumlah		

Saldo Kas per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp dan Saldo Kas tahun 2019 sebesar Rp terdiri atas :

1. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang tunai/kas di rekening giro yang masih berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp..... Kas tersebut merupakan :
 - a. ...
 - b. ...
2. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang masih berada dalam penguasaan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sebesar Rp Kas tersebut merupakan :
 - a. ...
 - b. ...
3. Kas BLUD Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan kas dan setara kas yang digunakan untuk pengelolaan penerimaan pendapatan dan biaya yang berasal dari hasil operasional BLUD, sebesar Rp

Rinci Kas di BLUD Puskesmas adalah sebagai berikut :

- BLUD Puskesmas : Rp
- BLUD Puskesmas : Rp
- BLUD Puskesmas : Rp
- BLUD Puskesmas : Rp

- BLUD Puskesmas : Rp
- Jumlah : Rp

4. Kas Lainnya, merupakan Kas BOS sebesar Rp merupakan Dana BOS yang berada pada masing-masing sekolah di lingkungan Kabupaten Brebes. Dengan rincian sebagai berikut :

- SD : Rp pada SD Negeri
- SMP : Rp pada SMP Negeri

2. Piutang

Saldo piutang per 31 Desember 2019 terdiri atas Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar TP-TGR, Piutang BLUD, Piutang Lainnya sebesar Rp

Jenis Piutang	Nilai Piutang
Piutang Pendapatan	
1) Piutang Pajak Daerah	Nihil
2) Piutang Retribusi	
3) Piutang Pendapatan non Pajak/Non Retribusi	
4) Piutang BLUD	
Piutang Lainnya	
1) Bag. Lancar TP-TGR	
2) Piutang Ex-Dana Bergulir	
Jumlah	

PIUTANG PENDAPATAN

1) Piutang Pajak Daerah

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan pajak daerah, sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 belum diterima, Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2019 adalah Rp..... dengan rincian sebagai berikut :

Piutang Pajak Daerah :	2019	2018
	Rp	Rp
Piutang Pajak	Nihil	

Piutang Pajak		
Jumlah		

Mutasi Piutang Pajak sebagai berikut :

Saldo Piutang Pajak Tahun 2019 Rp

Penambahan :

a. Piutang atas transaksi tahun 2019 Rp

b. Koreksi saldo tahun 2018 Rp

c. dst Rp

Pengurangan :

a. Setoran tahun 2019 Rp

b. Koreksi saldo tahun 2018 Rp

c. dst Rp

Saldo Piutang Pajak Tahun 2019 Rp

2) Piutang Retribusi Daerah

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan retribusi daerah, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 belum diterima, Saldo Rekening Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut :

Piutang Retribusi Daerah :	2019	2018
	Rp	Rp
Piutang Retribusi	Nihil	
Piutang Retribusi		
Jumlah		

Mutasi Piutang Retribusi sebagai berikut :

Saldo Piutang Retribusi Tahun 2019 Rp

Penambahan :

a. Piutang baru atas transaksi tahun 2019 Rp

b. Koreksi saldo tahun 2018 Rp

Pengurangan :

a. Setoran pada tahun 2019	Rp
b. Koreksi saldo tahun 2018	Rp
c. dst	Rp
Saldo Piutang Retribusi Tahun 2019	Rp

3) Piutang Pendapatan Non Pajak dan Non Retribusi

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan daerah selain dari pajak dan retribusi daerah, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 belum diterima. Saldo piutang dimaksud adalah Rp..... Rincian Piutang Lain-lain adalah sebagai berikut :

No	Piutang Lain-Lain :	Piutang Kepada	2019	2018
			Rp	Rp
1.	Piutang Jaminan Pelaksanaan Putus Kontrak		Nihil	
2.	Piutang Kelebihan Pembayaran			
3.	Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan			
4.	Piutang Denda Keterlambatan Pelaporan			
	Dst			
	Jumlah			

Penjelasan :

1. Piutang Jaminan Pelaksanaan Putus Kontrak merupakan Piutang Jaminan atas pekerjaan oleh
(nama rekanan)
2. Piutang Kelebihan Pembayaran merupakan piutang atas kelebihan pembayaran kepada (nama pihak ke-3)
3. Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan merupakan piutang atas denda keterlambatan pekerjaan Daftar Piutang Keterlambatan Pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Piutang Kepada	Nilai
			Rp
1.		Nihil	
2.			
3.			
	Jumlah		

4. Piutang Denda Keterlambatan Pelaporan merupakan piutang atas denda keterlambatan pelaporan (nama laporan) yang harus diterima dari (nama pihak yang wajib melaporkan)

No	Uraian	Piutang Kepada	Nilai
			Rp
1.		Nihil	
2.			
3.			
	Jumlah		

5) Piutang BLUD

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan daerah dari aktivitas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 belum diterima. Saldo piutang dimaksud per tanggal tersebut adalah Rp..... Rincian Piutang BLUD pada SKPD adalah sebagai berikut :

Piutang BLUD :	2019	2018
	Rp	Rp
1. Piutang	Nihil	
2. Piutang		
3. Piutang		
Jumlah		

Penjelasan : *(disesuaikan dengan kondisi SKPD, penjelasan ini dapat dibuat lebih terperinci dengan lampiran tabel)*

1. Piutang sebesar Rp merupakan
2. Piutang sebesar Rp merupakan
3. Piutang sebesar Rp merupakan

3) Bagian Lancar TP-TGR

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas Bagian Lancar dari Putang TP-TGR yang akan diterima pada tahun anggaran berikutnya. Piutang ini merupakan Piutang TP-TGR yang telah ditetapkan SK Pembebanannya oleh Majelis TP-TGR.

Saldo piutang dimaksud adalah Rp..... Rincian Bagian Lancar TP-TGR adalah sebagai berikut :

Nama	Saldo 2018	Mutasi 2019		Saldo 2019
	Rp	Tambah	Kurang	Rp
1.	Nihil			
2.				
3.				
Jumlah				

Mutasi Piutang TP-TGR sebagai berikut :

Saldo Piutang TP-TGR Tahun 2018 Rp

Penambahan :

a. Piutang baru penetapan th 2019 Rp

b. Koreksi saldo tahun 2018 Rp

Pengurangan :

a. Setoran tahun 2019 Rp

b. Koreksi saldo tahun 2018 Rp

c. dst Rp

Saldo Piutang TP-TGR Tahun 2019 Rp

5) Piutang Ex-Dana Bergulir

Saldo Piutang Ex-Dana Bergulir Tahun 2018 Rp

Penambahan :

a. Piutang baru penetapan th 2019 Rp

b. Koreksi saldo tahun 2018 Rp

c. dst Rp

Pengurangan :

a. Setoran tahun 2019 Rp

b. Koreksi saldo tahun 2018 Rp

c. dst Rp

Saldo Piutang Ex-Dana Bergulir Tahun 2019 Rp

6) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dibentuk sebesar piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan umur piutang. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2019 sebesar **minus** Rp..... dengan perincian sebagai berikut :

Jenis Piutang	Nilai Piutang	Jumlah Penyisihan Piutang
Piutang Pendapatan		

1) Piutang Pajak Daerah		-
2) Piutang Retribusi		-
3) Piutang Pendapatan non Pajak/Non Retribusi		-
4) Piutang BLUD		-
Piutang Lainnya		
1) Bag. Lancar TP-TGR		-
2) Piutang Ex-Dana Bergulir		-
Jumlah		-

Saldo masing-masing rekening Penyisihan Piutang Tak Tertagih dapat dijelaskan sebagai berikut :

Piutang Pajak Daerah	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang
1. Piutang Pajak		-
2. Piutang Pajak		-
Jumlah		-

Piutang Retribusi Daerah	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang
1. Piutang Ret.		-
2. Piutang Ret.		-
Jumlah		-

Piutang Pendapatan Non Pajak/Retribusi	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang
1.		-
2.		-
Jumlah		-

Piutang Lainnya - Bagian Lancar	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang
--	----------------------	---------------------------

TP-TGR		
1. Piutang		-
2. Piutang		-
Jumlah		-

Piutang Lainnya - Ex-Dana Bergulir	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang
1. Piutang		-
2. Piutang		-
Jumlah		-

3. Persediaan

Rekeningini menggambarkan harga perolehan persediaan barang pakai habis yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, dengan rincian saldo per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

Persediaan :	2019	2018
	Rp	Rp
1. Bahan		
2. Suku Cadang		
3. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.244.000	1.255.000
4. Obat-obatan		
5. Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan		
6. Persediaan Utk Tujuan Strategis/Bergaja-jaga		
7. Natura dan Pakan		
8. Persediaan Penelitian		
9. Persediaan Dalam Proses		
10. Persediaan Barang BOS		
Jumlah	1.244.000	1.255.000

Mutasi persediaan selama tahun 2019 sebagai berikut :

URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
Bahan		25.755.000	25.755.000	
Suku Cadang				
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.255.000	373.181.900	373.192.900	1.244.000
Obat-obatan				
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan				
Persediaan Utk Tujuan Strategis/Bergaja-jaga				

Natura dan Pakan		106.355.000	106.355.000	
Persediaan Penelitian				
Persediaan Dalam Proses				
Persediaan Barang BOS				
JUMLAH	1.255.000	505.291.900	505.302.900	1.244.000

Penjelasan penambahan persediaan selama th 2019 adalah sebagai berikut :

URAIAN REKENING BEBAN	KOREKSI (+) SALDO AWAL	PENGADAAN TH 2019	REKLAS DARI PEMELIHARAAN	REKLAS DARI B. MODAL	MUTASI MASUK	HIBAH MASUK	HUTANG PERSEDIAAN	JUMLAH PENAMBAHAN
Bahan		25.755.000						25.755.000
Suku Cadang								-
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		373.181.900						373.181.900
Obat-obatan								-
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan								-
Persediaan Utk Tujuan Strategis/Bergaja-jaga								-
Natura dan Pakan		106.355.000						106.355.000
Persediaan Penelitian								-
Persediaan Dalam Proses								-
Persediaan Barang BOS								-
JUMLAH	-	505.291.900	-	-	-	-	-	505.291.900

Penjelasan pengurangan persediaan selama th 2019 adalah sebagai berikut :

URAIAN REKENING BEBAN	KOREKSI (-) SALDO AWAL	PEMAKAIAN TH 2018	MUTASI KELUAR	HIBAH KELUAR	REKLAS KE ASET TETAP	PINDAH KE KADALUARSA/-RUSAK	JUMLAH PENGURANGAN
Bahan		25.755.000					25.755.000
Suku Cadang							-
URAIAN REKENING BEBAN	KOREKSI (-) SALDO AWAL	PEMAKAIAN TH 2018	MUTASI KELUAR	HIBAH KELUAR	REKLAS KE ASET TETAP	PINDAH KE KADALUARSA/-RUSAK	JUMLAH PENGURANGAN
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor		373.192.900					373.192.900
Obat-obatan							-
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan							-
Persediaan Utk Tujuan Strategis/Bergaja-jaga							-
Natura dan Pakan		106.355.000					106.355.000

Persediaan Penelitian							-
Persediaan Dalam Proses							-
Persediaan Barang BOS							-
JUMLAH	-	505.302.900	-	-	-	-	505.302.900

Dari saldo tersebut tidak termasuk di dalamnya persediaan yang telah kadaluarsa dan rusak. Rekap barang Kadaluarsa dan Rusak sebagai berikut :

Barang Kadaluarsa/Usang

Persediaan :	Kadaluarsa	Usang
	Rp	Rp
1. ATK Pakai habis & Barang Cetak	Nihil	
2. Obat-Obatan dan Alkes		
3. Bibit Tanaman/Ternak		
4. Peralatan Kantor/Rumah Tangga		
5. Persediaan Lainnya		
Jumlah		

Barang Rusak

Persediaan :	Saldo
	Rp
1. ATK Pakai habis & Barang Cetak	
2. Obat-Obatan dan Alkes	
3. Bibit Tanaman/Ternak	
4. Peralatan Kantor/Rumah Tangga	
5. Persediaan Lainnya	
Jumlah	

Dari saldo tersebut sebesar Rp..... merupakan barang-barang yang direncanakan akan diserahkan kepada masyarakat namun masih berada pada SKPD Adapun rinciannya sebagaimana lampiran.

B. Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

1 . Aset Tetap

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Brebes berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan aset tetap yang digunakan oleh SKPD Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes per 31 Desember 2019 dan 2018. Perolehan aset tetap berasal dari kapitalisasi

Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang didalamnya termasuk pengadaan aset tetap dalam tahun anggaran berkenaan dan/atau perolehan lainnya yang sah. Belanja yang tidak dikapitalisasi berdasarkan kebijakan akuntansi adalah Belanja Perjalanan Dinas, Belanja ATK, penggandaan dan sejenisnya.

Saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Brebes per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 6.473.979.970 dan Rp 5.960.548.140 dengan rincian sebagai berikut :

Pada tahun 2019 dilakukan penyesuaian saldo akhir tahun 2019 pada akun aset tetap yang sebelumnya berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah disesuaikan dengan perubahan kodefikasi aset tetap berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Adapun perubahan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Aset Tetap (kode 108)	2019	2018
	Rp	Rp
a. Tanah	1.033.750.000	1.033.750.000
b. Peralatan dan Mesin	2.845.560.645	2.629.921.290
c. Gedung dan Bangunan	1.633.721.000	1.633.721.000
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
e. Aset Tetap Lainnya	960.948.325	960.948.325
f. Konstruksi dalam Pekerjaan		
g. Akumulasi Penyusutan	(2.463.309.120)	(2.417.691.250)
Jumlah Aset Tetap	4.010.670.850	3.840.649.365

Perubahan kodefikasi mempengaruhi saldo akhir aset tetap tahun 2019 dengan perubahan sebagai berikut :

VERSI PERMENDAGRI 108		VERSI PERMENDAGRI 64	
URAIAN	NOMINAL	URAIAN	NOMINAL
Tanah	1.033.750.000	Tanah	1.033.750.000
Tanah	1.033.750.000	Tanah	1.033.750.000
Peralatan Dan Mesin	2.845.560.645	Peralatan & Mesin	2.845.560.645
Alat Besar	10.400.000	Alat - alat Berat	10.400.000
Alat Angkutan	1.342.752.000	Alat -alat Angkutan	1.342.752.000
Alat Bengkel Dan Alat Ukur		Alat Bengkel	
Alat Pertanian		Alat Pertanian & Peternakan	
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.000.439.355	Alat -alat Kantor & RT	1.440.561.455

Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	39.017.190	Alat Studio & Alat Komunikasi	42.967.190
Alat Kedokteran Dan Kesehatan	1.880.000	Alat Ukur	
Alat Laboratorium		Alat - alat Kedokteran	
Alat Persenjataan		Alat Laboratorium	1.880.000
Komputer	449.472.100	Alat Keamanan	7.000.000
Alat Eksplorasi			
Alat Pengeboran			
Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian			
Alat Bantu Eksplorasi			
Alat Keselamatan Kerja	1.600.000		
Alat Peraga			
Peralatan Proses/Produksi			
Rambu – Rambu			
Peralatan Olah Raga			
Gedung Dan Bangunan	1.633.721.000	Gedung & Bangunan	1.633.721.000
Bangunan Gedung	1.633.721.000	Bangunan Gedung	1.633.721.000
Monumen		Bangunan Monumen	
Bangunan Menara			
Tugu Titik Kontrol/Pasti			
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	-	Jalan,Irigasi & Jaringan	-
Jalan Dan Jembatan		Jalan & jembatan	
Bangunan Air		Bangunan Air (Irigasi)	
Instalasi		Instalasi	
Jaringan		Jaringan	
Aset Tetap Lainnya	960.948.325	Aset Tetap Lainnya	960.948.325
Bahan Perpustakaan	960.498.325	Buku & Perpustakaan	960.498.325
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	
Hewan		Hewan/Ternak & Tumbuhan	450.000
Biota Perairan			
Tanaman	450.000		
Barang Koleksi Non Budaya			
Aset Tetap Dalam Renovasi			
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	Konstruksi dalam Pengerjaan	
Konstruksi Dalam Pengerjaan		Konstruksi dalam Pengerjaan	
Jumlah	6.473.979.970	Jumlah	6.473.979.970

Mutasi aset tetap tahun 2019 sesuai klasifikasi Permendagri 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN (RP)	PENGURANGAN (RP)	SALDO AKHIR
Tanah	1.033.750.000	-	-	1.033.750.000
Tanah	1.033.750.000			1.033.750.000
Peralatan Dan Mesin	2.629.921.290	381.286.000	165.646.645	2.845.560.645
Alat Besar				-
Alat Angkutan	1.407.662.000	109.900.000	164.410.000	1.353.152.000
Alat Bengkel				-
Alat Pertanian & Peternakan				-
Alat -alat Kantor & RT	1.181.362.100	260.436.000	1.236.645	1.440.561.455
Alat Studio & Alat Komunikasi	39.017.190	3.950.000		42.967.190
Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.880.000			1.880.000
Alat - alat Kedokteran				-
Alat Laboratorium				-
Alat Keamanan		7.000.000		7.000.000
Gedung & Bangunan	1.532.816.000	664.582.000	563.677.000	1.633.721.000
Bangunan Gedung	969.139.000	664.582.000	558.677.000	1.075.044.000
Bangunan Monumen				-
Jalan,Irigasi & Jaringan				-
Jalan & jembatan				-
Bangunan Air (Irigasi)	5.000.000		5.000.000	-
Instalasi				-
Jaringan	558.677.000			558.677.000
Aset Tetap Lainnya	764.060.850	196.887.475	-	960.948.325
Buku & Perpustakaan	764.060.850	196.437.475		960.498.325
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan				-
Hewan/Ternak & Tumbuhan		450.000		450.000
Aset Tetap Renovasi				-
Konstruksi dalam Pengerjaan				-
Konstruksi dalam Pengerjaan				-
JUMLAH	5.960.548.140	1.242.755.475	729.323.645	6.473.979.970

Penjelasan mutasi **penambahan** aset tahun 2019 tersebut adalah sebagai berikut :

a. Belanja Modal

KODE 64	URAIAN KODE 64	Rp
01.03.01	TANAH	
01.03.02	PERALATAN DAN MESIN	31.000.000
01.03.03	GEDUNG DAN BANGUNAN	100.905.000
01.03.04	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	
01.03.05	ASET TETAP LAINNYA	274.200.000
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
	JUMLAH	406.105.000

b. Hibah dari Bank Indonesia Corner

KODE 64	URAIAN KODE 64	Rp
01.03.01	TANAH	
01.03.02	PERALATAN DAN MESIN	37.420.000
01.03.03	GEDUNG DAN BANGUNAN	
01.03.04	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	
01.03.05	ASET TETAP LAINNYA	44.404.700
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
	JUMLAH	81.824.700

c. Hibah dari Perpustakaan Provinsi

KODE 64	URAIAN KODE 64	Rp
01.03.01	TANAH	
01.03.02	PERALATAN DAN MESIN	10.716.000
01.03.03	GEDUNG DAN BANGUNAN	
01.03.04	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	
01.03.05	ASET TETAP LAINNYA	70.532.775
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
	JUMLAH	81.248.775

d. Koreksi Tambah

KODE 64	URAIAN KODE 64	Rp
01.03.01	TANAH	
01.03.02	PERALATAN DAN MESIN	109.900.000
01.03.03	GEDUNG DAN BANGUNAN	563.677.000
01.03.04	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	

01.03.05	ASET TETAP LAINNYA	
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
	JUMLAH	673.577.000

Penjelasan mutasi **pengurangan** aset tahun 2019 tersebut adalah sebagai berikut :

a. Reklasifikasi ke Extracomtable

KODE 64	URAIAN KODE 64	Rp
01.03.01	TANAH	
01.03.02	PERALATAN DAN MESIN	1.236.645
01.03.03	GEDUNG DAN BANGUNAN	
01.03.04	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	
01.03.05	ASET TETAP LAINNYA	
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
	JUMLAH	1.236.645

b. Mutasi Keluar ke DINKOMUNAG

KODE 64	URAIAN KODE 64	Rp
01.03.01	TANAH	
01.03.02	PERALATAN DAN MESIN	12.000.000
01.03.03	GEDUNG DAN BANGUNAN	
01.03.04	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	
01.03.05	ASET TETAP LAINNYA	
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
	JUMLAH	12.000.000

c. Koreksi Kurang

KODE 64	URAIAN KODE 64	Rp
01.03.01	TANAH	
01.03.02	PERALATAN DAN MESIN	21.210.000
01.03.03	GEDUNG DAN BANGUNAN	
01.03.04	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	563.677.000
01.03.05	ASET TETAP LAINNYA	
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
	JUMLAH	584.887.000

d. Penghapusan Barang

KODE 64	URAIAN KODE 64	Rp
01.03.01	TANAH	
01.03.02	PERALATAN DAN MESIN	131.200.000

01.03.03	GEDUNG DAN BANGUNAN	
01.03.04	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	
01.03.05	ASET TETAP LAINNYA	
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
	JUMLAH	131.200.000

Saldo aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp..... dan Rp..... Adapun rincian Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Uraian KDP	Nama Rekanan	Nilai Kontrak	Kemajuan Fisik (%)	Nominal KDP	Keterangan
1. Pekerjaan	Nihil				
2. Pekerjaan					
3. Pekerjaan					
Jumlah					

Penjelasan : (apabila nihil tidak perlu diberi penjelasan)

1. Pekerjaan tersebut bersumber dana dari dan dilaksanakan sesuai kontrak nomor senilai Rp dengan jangka waktu pelaksanaan hari. Nilai yang telah direalisasikan adalah sebesar Rp Atas kemajuan fisik pekerjaan nilai yang masih harus dibayar sebesar Rp
2. Pekerjaan tersebut bersumber dana dari dan dilaksanakan sesuai kontrak nomor senilai Rp dengan jangka waktu pelaksanaan hari. Nilai yang telah direalisasikan adalah sebesar Rp Atas kemajuan fisik pekerjaan nilai yang masih harus dibayar sebesar Rp
3. Pekerjaan tersebut bersumber dana dari dan dilaksanakan sesuai kontrak nomor senilai Rp dengan jangka waktu pelaksanaan hari. Nilai yang telah direalisasikan adalah sebesar Rp Atas kemajuan fisik pekerjaan nilai yang masih harus dibayar sebesar Rp

Mutasi Aset Tetap terdiri dari mutasi penambahandan mutasi pengurangan Aset Tetap atas barang pengadaan tahun 2019.

Penambahan Aset Tetap Tahun 2019 terdiri atas:

- Penambahan aset koreksi hasil sensus tahun 2019 Rp **673.577.000**
- Penambahan aset dari belanja modal tahun 2019 Rp **406.105.000**
- Penambahan aset dari kapitalisasi belanja persediaan tahun 2019 Rp

- Penambahan aset dari kapitalisasi belanja pegawai tahun 2019 Rp.....;
- Penambahan aset dari kapitalisasi belanja jasa tahun 2019 Rp.....;
- Penambahan aset dari kapitalisasi belanja pemeliharaan tahun 2019 Rp.....;
- Reklasifikasi dari barang yang diserahkan kepada pihak ke-3 Rp
- Penerimaan aset dari donasi/hibah dari Bank Indonesia Corner Rp **81.824.700**
- Penerimaan aset dari donasi/hibah dari pemerintah provinsi Rp **81.248.775**
- Penerimaan aset dari mutasi masuk dari SKPD lain Rp sebagai berikut :
 - Dari SKPD Rp
 - Dari SKPD Rp
 - Dari SKPD Rp
- Pengadaan aset tetap belum dibayar (hutang aset tetap) Rp, berupa
- Reklasifikasi dari aset lainnya Rp
- Penambahan aset dari KDP yang telah menjadi aset tetap Rp
- Koreksi penambahan lainnya karena Rp

Pengurangan Aset Tetap Tahun 2019 terdiri atas:

- Pengurangan aset koreksi hasil sensus Rp
- Tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap (ekstrakomptabel) Rp **1.236.645**
- Reklasifikasi ke Beban Persediaan Rp
- Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan Rp
- Reklasifikasi ke Beban Perjalanan Dinas Rp
- Hibah keluar kepada Rp
- Mutasi ke SKPD lain/Unit Kerja Rp **12.000.000** sebagai berikut :
 - Mutasi ke SKPD DINKOMUNAG Rp **12.000.000**
 - Mutasi ke SKPD Rp
 - Mutasi ke SKPD Rp
- Reklasifikasi KDP yang telah selesai dikerjakan dan menjadi aset Rp.....;
- Koreksi kurang karena koreksi kurang saldo awal Rp **21.210.000**
- Koreksi kurang karena kapitalisasi instalasi air bersih/air baku ke bangunan gedung tempat kerja Rp 5.000.000
- Koreksi kurang karena kapitalisasi jaringan telepon ke bangunan

gedung tempat kerja Rp 558.677.000

- Reklasifikasi ke Aset Lainnya barang Rusak Berat (RB) Rp;
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya barang Tidak Ditemukan (TD) Rp;
- Penghapusan barang Baik/Rusak Ringan Rp 131.200.000
- Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud Rp;

2. Akumulasi Penyusutan

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2019 tidak termasuk penyusutan atas aset tetap yang telah diusulkan penghapusannya dan telah dipindahbukukan ke kelompok Aset Lainnya akun Aset Lain-lain.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel Penambahan dan Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

KODE REKENING	URAIAN	JML PENAMBAHAN	JML PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1 . 3 . 7 . 01 . 01	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	-	-	-
1 . 3 . 7 . 01 . 03	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu	(2.028.576,00)	-	(3.964.288,00)
1 . 3 . 7 . 01 . 04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(131.650.288,00)	(42.286.645,00)	(892.876.002,00)
1 . 3 . 7 . 01 . 14	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(128.934.871,00)	-	(308.831.871,00)
1 . 3 . 7 . 01 . 15	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	(44.966.500,00)	(83.518.330,00)	(376.346.500,00)
1 . 3 . 7 . 01 . 16	Akumulasi Penyusutan Komputer	(110.060.196,00)	-	(291.478.550,00)
1 . 3 . 7 . 01 . 17	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(9.766.667,00)	-	(65.370.000,00)
1 . 3 . 7 . 01 . 18	Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(5.893.438,00)	-	(21.930.314,00)
1 . 3 . 7 . 01 . 19	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(610.000,00)	-	(4.120.000,00)
1 . 3 . 7 . 01 . 24	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	(188.000,00)	-	(1.316.000,00)
1 . 3 . 7 . 01 . 35	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	(1.600.000,00)	-	(1.600.000,00)
1 . 3 . 7 . 02 . 01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	(293.525.911,00)	-	(495.475.595,00)
1 . 3 . 7 . 02 . 02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	-	-
1 . 3 . 7 . 02 . 04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Bersejarah	-	-	-
1 . 3 . 7 . 02 . 08	Akumulasi Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-	-
1 . 3 . 7 . 03 . 20	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum	-	(1.500.002,00)	-
2 . 3 . 7 . 03 . 22	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon	-	(446.401.600,00)	-
		(729.224.447,00)	(573.706.577,00)	(2.463.309.120,00)

Penambahan akumulasi penyusutan selama tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel Penambahan Akumulasi Penyusutan

KODE REKENING	URAIAN	PENAMBAHAN				JML PENAMBAHAN
		BEBAN PENY.	MUTASI MASUK	HIBAH MASUK	KOREKSI +	
1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat					-
1.3.7.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu	(1.485.715,00)	-	-	(542.861,00)	(2.028.576,00)
1.3.7.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(131.650.288,00)	-	-	-	(131.650.288,00)
1.3.7.01.14	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(31.334.871,00)	-	-	(97.600.000,00)	(128.934.871,00)
1.3.7.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	(44.966.500,00)	-	-	-	(44.966.500,00)
1.3.7.01.16	Akumulasi Penyusutan Komputer	(84.274.275,00)	-	-	(25.785.921,00)	(110.060.196,00)
1.3.7.01.17	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	(9.600.000,00)	-	-	(166.667,00)	(9.766.667,00)
1.3.7.01.18	Akumulasi Penyusutan Alat Studio	(5.893.438,00)	-	-	-	(5.893.438,00)
1.3.7.01.19	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(560.000,00)		-	(50.000,00)	(610.000,00)
1.3.7.01.24	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	(188.000,00)		-	-	(188.000,00)
1.3.7.01.35	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	(1.600.000,00)		-	-	(1.600.000,00)
1.3.7.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	(32.962.317,00)	-	-	(260.563.594,00)	(293.525.911,00)
1.3.7.02.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-		-	-	-
1.3.7.02.04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Bersejarah	-	-	-	-	-
1.3.7.02.08	Akumulasi Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-	-	-	-
1.3.7.03.20	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum	-	-	-	-	-
2.3.7.03.22	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon	-	-	-	-	-
		(344.515.404,00)	-	-	(384.709.043,00)	(729.224.447,00)

Pengurangan akumulasi penyusutan selama tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel Pengurangan Akumulasi Penyusutan

KODE REKENING	URAIAN	PENGURANGAN			JML PENGURANGAN
		PENGHAPUSAN	MUTASI KELUAR	KOREKSI -	
1.3.7.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat				-
1.3.7.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu	-	-	-	-
1.3.7.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(21.300.000,00)	(12.000.000,00)	(8.986.645,00)	(42.286.645,00)
1.3.7.01.14	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	-	-	-	-

1.3.7.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	-	-	(83.518.330,00)	(83.518.330,00)
1.3.7.01.16	Akumulasi Penyusutan Komputer	-	-	-	-
1.3.7.01.17	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	-	-
1.3.7.01.18	Akumulasi Penyusutan Alat Studio	-	-	-	-
1.3.7.01.19	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	-	-	-	-
1.3.7.01.24	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	-	-	-	-
1.3.7.01.35	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan	-	-	-	-
1.3.7.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	-	-
1.3.7.02.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	-	-	-
1.3.7.02.04	Akumulasi Penyusutan Bangunan Bersejarah	-	-	-	-
1.3.7.02.08	Akumulasi Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	-	-	-	-
1.3.7.03.20	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum	(1.499.994,00)	-	(8,00)	(1.500.002,00)
2.3.7.03.22	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon	(446.401.600,00)	-	-	(446.401.600,00)
		(469.201.594,00)	(12.000.000,00)	(92.504.983,00)	(573.706.577,00)

C. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar Rp 8.200.000 dan Rp 8.200.000 dengan rincian :

ASET LAINNYA	Saldo Th. 2018	Penambahan	Pengurangan	Saldo Th. 2019
Tagihan Penjualan Angsuran				
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah				
Kemitraan dengan Pihak Ketiga				
Aset Tak Berwujud	36.334.000			36.334.000
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(31.534.000)	(2.400.000)		(33.934.000)
Aset Lain-lain	8.200.000,00			8.200.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(7.000.000)			(7.000.000)
Aset Tetap tidak ditemukan				
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya				
Sub total	1.200.000			1.200.000
Jumlah	(30.334.000)	(2.400.000)		(32.734.000)

1. Aset Tak Berwujud

Aset tersebut merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp 36.334.000 dan 36.334.000
Saldo Aset Tak Berwujud sebesar Rp 36.334.000 merupakan aset yang berupa software/ aplikasi komputer.

- Penambahan Aset Tidak Berwujud sebagai berikut :
 - a. Pengadaan aplikasi Rp
 - b. Koreksi penambahan saldo tahun 2018 karenasebesar Rp
- Pengurangan Aset Tidak Berwujud sebagai berikut :
 - b. Penghapusan software sebesar Rp
 - c. Koreksi pengurangan saldo tahun 2018 karenasebesar Rp
 - d. dst ...

2. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp (33.934.000) terdiri atas :

- Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2018 sebesar (31.534.000)
- Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2019 sebesar Rp 2.400.000
- Koreksi penambahan Amortisasi Aset Tidak Berwujud saldo tahun 2018 sebesar Rp
- Koreksi pengurangan Amortisasi Aset Tidak Berwujud saldotaun 2018sebesar Rp
- Dst ...

3. Aset Lain-lain Rp 8.200.000 terdiri atas :

- a. Aset tetap Rusak Berat (RB) yang telah tidak digunakan lagi untukoperasional SKPD sebesar Rp 8.200.000
- b. Aset tetap Tidak Ditemukan (TD) sebesar Rp
Atas barang-barang tersebut yang telah dihapusbukukan dan tidak tercatat pada KIB sebesar Rp, sedangkan yang belum dihapusbukukan dan masih tercatat pada KIB sebesar Rp

b. Detail Engineering (DE) yang tercatat pada Aset Lain-lain sebagai berikut :

Tabel Detail Engineering (DE)

Uraian	Saldo 2017	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2018
Jumlah				

- Penambahan merupakan DE 2019 yang belum direalisasikan pekerjaan fisiknya Rp
 - Pengurangan Saldo DE 2018 yang telah direklasifikasi ke aset tetap dan telah menambah nilai fisik yang berkenaan Rp
 - Pengurangan Saldo DE 2018 yang telah direklasifikasi ke aset tetap lainnya buku Rp
 - Pengurangan Saldo DE 2018 yang dihapuskan karena batal digunakan Rp
- c. Barang Hibah Keluar yang belum dihapuskan sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Hibah Keluar Belum Dihapuskan

URAIAN	NOMINAL
Tanah	
Tanah	
Peralatan Dan Mesin	
Alat Besar	
Alat Angkutan	
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	
Alat Pertanian	
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	
Alat Kedokteran Dan Kesehatan	
Alat Laboratorium	
Alat Persenjataan	
Komputer	
Alat Eksplorasi	
Alat Pengeboran	
Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	
Alat Bantu Eksplorasi	
Alat Keselamatan Kerja	
Alat Peraga	
Peralatan Proses/Produksi	
Rambu - Rambu	
Peralatan Olah Raga	
Gedung Dan Bangunan	
Bangunan Gedung	

URAIAN	NOMINAL
Monumen	
Bangunan Menara	
Tugu Titik Kontrol/Pasti	
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	
Jalan Dan Jembatan	
Bangunan Air	
Instalasi	
Jaringan	
Aset Tetap Lainnya	
Bahan Perpustakaan	
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
Hewan	
Biota Perairan	
Tanaman	
Barang Koleksi Non Budaya	
Aset Tetap Dalam Renovasi	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	
Konstruksi Dalam Pengerjaan	
Jumlah	

d. Barang berlebih yang belum dinilai berupasebesar Rp.....)

e. dst

4. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain berupa Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Rusak Berat (RB), Tidak Ditemukan (TD) dan Hibah Keluar belum dihapuskan sebagai berikut :

Tabel MutasiAk. Penyusutan Barang Rusak Berat (RB)

URAIAN	SALDO TH 2018	PINDAH KONDISI	PENGHAPUSAN	KOREKSI (+/-)	SALDO TH 2019
Tanah					
Alat Besar					
Alat Angkutan					
Alat Bengkel					
Alat Pertanian & Peternakan					
Alat Kantor & Rumah Tangga	7.000.000				7.000.000
Alat Studio & Komunikasi					
Alat Ukur					
Alat Kedokteran					
Alat Laboratorium					
Alat Keamanan					
Bangunan Gedung					
Bangunan Monumen					
Jalan & jembatan					
Bangunan Air (Irigasi)					
Instalasi					
Jaringan					

URAIAN	SALDO TH 2018	PINDAH KONDISI	PENGHAPUSAN	KOREKSI (+/-)	SALDO TH 2019
Buku & Perpustakaan					
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan					
Hewan/Ternak & Tumbuhan					
Konstruksi Dalam Pengerjaan					
Jumlah	7.000.000				7.000.000

Tabel Mutasi Ak. Penyusutan Barang Tidak Ditemukan (TD)

URAIAN	SALDO TH 2018	PINDAH KONDISI	PENGHAPUSAN	KOREKSI (+/-)	SALDO TH 2019
Tanah					
Alat Besar					
Alat Angkutan					
Alat Bengkel					
Alat Pertanian & Peternakan					
Alat Kantor & Rumah Tangga					
Alat Studio & Komunikasi					
Alat Ukur					
Alat Kedokteran					
Alat Laboratorium					
Alat Keamanan					
Bangunan Gedung					
Bangunan Monumen					
Jalan & jembatan					
Bangunan Air (Irigasi)					
Instalasi					
Jaringan					
Buku & Perpustakaan					
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan					
Hewan/Ternak & Tumbuhan					
Konstruksi Dalam Pengerjaan					
Jumlah					

Tabel Mutasi Barang Hibah Keluar Belum Dihapus

URAIAN	SALDO TH 2018	PENGHAPUSAN	KOREKSI (+/-)	SALDO TH 2019
Tanah				
Alat Besar				
Alat Angkutan				
Alat Bengkel				
Alat Pertanian & Peternakan				
Alat Kantor & Rumah Tangga				
Alat Studio & Komunikasi				
Alat Ukur				
Alat Kedokteran				
Alat Laboratorium				
Alat Keamanan				
Bangunan Gedung				

URAIAN	SALDO TH 2018	PENGHAPUSAN	KOREKSI (+/-)	SALDO TH 2019
Bangunan Monumen				
Jalan & jembatan				
Bangunan Air (Irigasi)				
Instalasi				
Jaringan				
Buku & Perpustakaan				
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan				
Hewan/Ternak & Tumbuhan				
Konstruksi Dalam Pengerjaan				
Jumlah				

3.4.2 Kewajiban

3.4.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, dengan saldo masing-masing sebesar Rp..... dan Rp..... dapat dirinci sebagai berikut :

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK :	Th. 2019	Th. 2018
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga		
Uang Muka dari Kas Daerah		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja	50.096.838	54.157.644
Utang Jangka Pendek Lainnya		
RK-PPKD		
Jumlah	50.096.838	54.157.644

1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Saldo rekening Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2019 Rp....., merupakan :

1. Pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran akan tetapi belum disetorkan ke Kas Negara, berupa Pajak sebesar Rp, Pajak sebesar Rpdst..
2. Belanja yang telah direalisasikan namun belum dibayar kepada pihak ke-3 dan kas nya masih berada di rekening Kas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.....
3. Dst (disesuaikan dengan kondisi SKPD)

Adapun mutasi Utang PFK tahun 2019 sebagai berikut :

URAIAN	SALDO TH 2018	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO TH 2019	KETERANGAN
Utang PPh 21					
Utang PPN					
Utang PPh 22					
Utang PPh 23					

Utang Titipan Kas Pihak ke-3					
Utang					
..... (dst)					
JUMLAH					

2) Utang Bunga

Utang Bunga merupakan reklasifikasi bagian lancar dari bunga pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun anggaran dengan saldo per 31 Desember 2019 dan 2018 nihil.

3) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan kepada pihak lain. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka sebesar per 31 Desember 2018 Rp

Pendapatan Diterima Dimuka :	2018	2017
	Rp	Rp
a.		
b.		
Jumlah		

4) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi bagian lancar dari pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun anggaran. dengan saldo per 31 Desember 2019 dan 2018 nihil.

5) Utang Belanja

Utang Belanja merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Brebes terkait dengan Beban Pegawai dan Beban Barang tahun anggaran sebelumnya namun belum diselesaikan. Saldo utang ini per 31 Desember 2019 sebesar Rp, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	SALDO 2018	TAMBAH	KURANG	SALDO 2019
Belanja Pegawai	46.700.000	42.670.125	46.700.000	42.670.125
Belanja Barang/Persediaan				-
Belanja Pemeliharaan				-
Belanja Jasa	7.457.644	7.426.713	7.457.644	7.426.713
Belanja Perjalanan Dinas				
Jumlah	54.157.644	50.096.838	54.157.644	50.096.838

Utang Belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Utang Belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan :
 - a. Utang Belanja Pegawai merupakan :
 - Utang TPP pegawai Bulan Desember sebesar Rp 42.670.125
 - b. Utang Belanja Barang/Persediaan merupakan:
 - Utang atas pengadaan sebesar Rp nihil
 - c. Utang Belanja Pemeliharaan merupakan:
 - Utang atas Pemeliharaansebesar Rp nihil
 - d. Utang Belanja Jasa merupakan :
 - Utang atas belanja air sebesar Rp 428.000
 - Utang atas belanja listrik sebesar Rp 4.463.328
 - Utang atas belanja telpon sebesar Rp 311.885
 - Utang atas belanja internet sebesar Rp 2.223.500
 - e. Utang Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp nihil
2. Pengurangan :
 - a. Utang Belanja Pegawai merupakan :
 - pembayaran utang tahun 2018 sebesar Rp 46.700.000
 - koreksi atas utang tahun 2018 sebesar Rp
 - b. Utang Belanja Barang merupakan :
 - pembayaran utang tahun 2018 sebesar Rp.....
 - koreksi atas utang tahun 2018 sebesar Rp
 - c. Utang Belanja Pemeliharaan merupakan :
 - pembayaran utang tahun 2018 sebesar Rp.....
 - koreksi atas utang tahun 2018 sebesar Rp
 - d. Utang Belanja Jasa merupakan :
 - pembayaran utang tahun 2018 sebesar Rp 7.457.644
 - koreksi atas utang tahun 2018 sebesar Rp
 - e. Utang Belanja Perjalanan Dinas merupakan :
 - pembayaran utang tahun 2018 sebesar Rp.....
 - koreksi atas utang tahun 2018 sebesar Rp

6) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Brebes terkait dengan Belanja Modal TA 2019 yang tidak dapat dikategorikan sebagai Utang Belanja namun belum diselesaikan. Saldo utang ini per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp dan Rp.....

Utang jangka pendek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Utang sebesar Rp merupakan
2. Utang sebesar Rp merupakan

3. Utang Putus Kontrak atas pekerjaan fisik sebagai berikut :

Tabel Utang Aset Tetap Putus Kontrak

Uraian KDP	Nama Rekanan	Nilai Kontrak	Kemajuan Fisik (%)	Nilai KDP	Kemajuan Keuangan (Rp)	Utang Aset Belum Dibayar
Pekerjaan						
Pekerjaan						
Pekerjaan						
Pekerjaan						
Pekerjaan						
Pekerjaan						
Pekerjaan						
Jumlah						

Penjelasan atas kemajuan fisik pekerjaan telah dijelaskan pada penjelasan Aset Tetap dhi. Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

3.4.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran dengan saldo per 31 Desember 2019 dan 2018 NIHIL.

3.4.2.3 R/K PPKD

Rekening ini merupakan rekening perantara yang digunakan oleh SKPD pada saat menerima SP2D dari BUD atau menyeter kas ke BUD. Saldo R/K PPKD sebelum konsolidasi per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.....

3.4.3 Ekuitas

Rekening ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dikuasai, setelah dikurangi hak pihak (*claim*) ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas pada Neraca SKPD 3.965.418.012 per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp 3.605.854.246 Perubahan atas ekuitas tahun 2019 adalah sebagai berikut :

PERUBAHAN EKUITAS TAHUN 2019 :	NILAI (Rp)
Saldo Ekuitas per 31 Desember 2018	3.605.854.246
Surplus/(Defisit)-LO	- 3.850.789.743
Koreksi Ekuitas	- 205.114.060
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	4.415.467.569
Jumlah	3.965.418.012

Surplus/(Defisit) - LO berasal dari selisih Pendapatan dengan Beban. Lebihterperinci mengenai Pendapatan dan Beban dijelaskan pada penjelasanmengenai Laporan Operasional.

Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan

karena perubahan kebijakan akuntansi. Koreksi Ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi kesalahan pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset.

Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

3.5 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda.

Nilai surplus/(defisit) pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp 4.415.467.569 Sedangkan nilai Surplus Defisit-LO sebesar Rp 3.850.789.743 sehingga memiliki perbedaan sebesar Rp 564.677.826 Perhitungan perbedaan nilai secara keseluruhan dirinci sebagai berikut :

Hubungan LRA-LO Tahun 2019

No	Uraian	Rp
A	Surplus/(Defisit) LRA	(4.415.467.569)
	Penambahan	
1	Realisasi Belanja Modal	406.105.000
2	Utang Beban Pegawai th 2018 yang sudah dibayar	46.700.000
3	Utang beban jasa tahun 2018 yang sudah dibayar	7.457.644
4	Saldo akhir persediaan alat/ bahan th. 2019	1.244.000
5	Hibah dari bank Indonesia	81.824.700
6	Hibah dari Perpus Provinsi	81.248.775
	Akumulasi penyusutan penghapusan aset tetap	469.201.594
B	Jumlah Penambahan	1.093.781.713
	Pengurangan	
1	Saldo awal persediaan tahun 2019	1.255.000
2	Beban Penyusutan aset tetap	342.915.404
3	Beban Barang Ekstrakomptabel	1.236.645
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	2.400.000
5	Beban Pegawai th 2019 yang belum dibayar	42.670.125

6	Beban Jasa tahun 2019 yang belum dibayar	7.426.713
7	Penghapusan Aset tetap	131.200.000
C	Jumlah Pengurangan	529.103.887
D	Surplus/(Defisit) LO (A+B-C)	(3.850.789.743)

Adapun penjelasan dari masing-masing item perbedaan antara LRA dan LO sebagaimana tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penambahan :

1. Realisasi Belanja Modal

Nilai realisasi belanja modal Tahun 2019 sebesar Rp. 406.105.000 mengurangi surplus/(defisit) LRA, namun tidak mengurangi nilai surplus/(defisit) LO dikarenakan pada saat pengadaan aset dari belanja modal langsung menambah nilai aset tetap di neraca tanpa menambah beban di LO.

2. Kapitalisasi Aset Tetap/Tak berwujud dari Belanja Non Modal

Total nilai kapitalisasi yang menambah nilai aset tetap tahun 2019 adalah sebesar Rp Ketika nilai aset tetap bertambah akibat dari pengadaan yang menggunakan pos belanja non modal, maka pada Laporan Operasional tetap tidak akan diakui sebagai penambah beban, namun tetap akan menambah nilai Aset Tetap di Neraca. Adapun rinciannya :

No	Jenis Belanja	Nilai
1	Belanja Pemeliharaan	
2	Belanja Jasa	
3	Belanja Barang/Persediaan	
	Jumlah	

3. Penerimaan Hibah Berupa Aset Tetap

Penerimaan hibah berupa barang sebesar Rp. 81.824.700 dan Rp. 81.248.775 dicatat sebagai penambah nilai aset tetap dan pendapatan pada Laporan Operasional. Karena penerimaan hibah tersebut tidak terdapat pada APBD, maka pendapatan tersebut tidak tercatat sebagai pendapatan pada LRA.

4. Penerimaan Hibah Berupa Persediaan

Penerimaan hibah berupa barang persediaan sebesardicatat sebagai penambah nilai aset lancar dan pendapatan pada Laporan Operasional. Karena penerimaan hibah tersebut tidak

terdapat pada APBD, maka pendapatan tersebut tidak tercatat sebagai pendapatan pada LRA.

5. Mutasi Piutang Tahun 2019

Mutasi piutang tahun berkenaan sebesar Rp merupakan nilai kenaikan piutang tahun 2019 dibandingkan dengan nilai piutang tahun sebelumnya. Nilai ini akan menambah pendapatan LO namun tidak akan mempengaruhi nilai pendapatan di LRA karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan antara kedua Laporan tersebut. Adapun mutasi dari piutang tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Penambahan Piutang

Pendapatan Asli Daerah	Rp
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp
Pendapatan Transfer	Rp

Pengurangan Piutang

Pendapatan Asli Daerah	(Rp)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	(Rp)
Pendapatan Transfer	(Rp)
Jumlah	Rp

6. Pendapatan Diterima Di Muka

Mutasi pendapatan diterima di muka sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.

7. Surplus atas Penjualan Aset Tetap

Surplus atas Penjualan Aset Tetap sebagai berikut :

- a. Penjualan Peralatan Mesin = Rp.....
- b. Penjualan Gedung dan Bangunan = Rp.....
- c. Penjualan Jalan, Irigasi, Jaringan = Rp.....
- d. Penjualan Aset Lainnya = Rp.....

8. Transfer Pemerintah Pusat Kurang Bayar

Merupakan Kewajiban Pemerintah kepada Pemkab Brebes yang masih belum dibayar, rincian sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.

9. Koreksi Harga, merupakan koreksi harga atas transaksi tahun 2019 sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c.
10. Utang beban pegawai bulan Desember 2018 yang sudah dibayar pada bulan Januari 2020 Sebesar Rp. 46.700.000
11. Utang beban barang dan jasa bulan Desember 2018 yang sudah dibayar pada bulan Januari 2020 sebesar Rp. 7.457.644
12. Saldo akhir persediaan alat/ bahan 2019 sebesar Rp. 1.244.000

Pengurangan :

1. Penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan tahun sebelumnya
 Pada akhir tahun 2018 terdapat nilai kas dibendahara penerimaan senilai Rp..... dan disetorkan kepada Kas Daerah pada tahun 2019.
2. Mutasi Nilai Persediaan Tahun 2019
 Mutasi Persediaan tahun 2019 adalah Saldo Persediaan tahun 2019 dikurangi Saldo Persediaan tahun 2018 sebesar Rp
3. Belanja Modal Tidak Dikapitalisasi
 Pada tahun 2019 terdapat ketidaksesuaian antara rekening belanja modal dengan pelaksanaan kegiatannya. Hal tersebut terjadi pada beberapa SKPD dikarenakan pelaksanaan anggaran belanja modal tidak memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap, sehingga akan menambah beban operasional tanpa menambah nilai aset tetap.
 Adapun nilai nonkapitalisasi atas belanja modal adalah sebesar Rp yang dapat dirinci sebagai berikut:
 - Menambah Beban Persediaan sebesar Rp.....
 - Menambah Beban Pemeliharaan sebesar Rp.....
 - Menambah Beban Jasa sebesar Rp.....
 - dst
4. Beban Penyusutan Aset Tetap Rp 342.915.404 dan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp 2.400.000 tahun 2019
 Pos beban penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud dan penyisihan piutang menjadi salah satu pembeda antara belanja LRA dan beban LO.
 Beban penyusutan/amortisasi dan penyisihan piutang merupakan bentuk implementasi basis akrual pada Pemerintah Daerah, dimana nilai beban tersebut menunjukkan tingkat penurunan potensi yang dimiliki oleh aset suatu entitas. Sedangkan pada LRA yang berbasis kas nilai beban dimaksud tidak menjadi pengurang surplus/(defisit) LRA.

5. Perbedaan pembebanan belanja dan beban dibayar dimuka

Pada LO tahun 2019 disajikan pos beban dibayar di muka yang merupakan bagian beban tahun 2019 sebesar Rp

Sedangkan di LRA dicatat sebesar nilai kas yang dibayarkan, sehingga terjadi selisih nilai antara keduanya sebesar Rp..... Adapun Belanja tahun 2019 yang diakui sebagai Beban dan Beban Dibayar Di Muka adalah :

No	Jenis Belanja	Belanja (LRA) th 2019	Beban th 2019	Beban Dibayar Di Muka
1	Belanja			
2	Belanja			
3	Belanja			
	Jumlah			

6. Defisit Penghapusan Aset Tetap

Defisit penghapusan aset tetap sebesar Rp. 131.200.000 diukur berdasarkan kerugian akibat dilaksanakannya penghapusan aset tetap. Apabila penghapusan suatu aset tetap yang masih memiliki nilai ekonomis, maka surplus/defisit

penghapusan aset tetap disajikan sebesar selisih antara nilai jual dengan nilai buku aset tersebut. Pos ini hanya disajikan dalam Laporan Operasional dan tidak disajikan dalam LRA.

7. Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2019 sebesar Rp.....

Pada Tahun 2019, nilai pendapatan diterima dimuka merupakan salah satu penyebab selisih antara surplus/(defisit) LRA dengan surplus/(defisit) LO. Nilai di LRA diakui berdasarkan kas yang diterima pada satu periode pelaporan, sedangkan di LO diakui ketika munculnya hak atas pendapatan pada tahun pelaporan.

8. Mutasi Utang Tahun 2019 sebesar Rp.....

Kenaikan/penurunan utang belanja/utang jangka pendek juga menjadi pembeda antara LRA dan LO. Pada tahun 2019 terjadi kenaikan nilai utang sebesar Rp..... sehingga nilai beban yang disajikan dalam LO menjadi lebih besar bila dibandingkan dengan nilai belanja di LRA. Sedangkan nilai penurunan atas utang adalah sebesar Rp

9. Saldo awal persediaan tahun 2019 sebesar Rp. 1.255.000

10. Beban barang ektrakontable sebesar Rp. 1.236.645 hasil reklasifikasi dari asset tetap.

11. Beban pegawai bulan Januari 2020 yang belum dibayar sebesar Rp. 42.670.125

12. Beban barang dan jasa bulan Januari 2020 yang belum dibayar sebesar Rp. 7.426.713

3.5.1 Penjelasan masing-masing pos terkait perbedaan pengakuan antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

3.5.1.1 Pengungkapan Perbedaan Pendapatan-LO dengan Pendapatan-LRA

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Selisih antara Pendapatan Asli Daerah-LO dengan pendapatan Asli Daerah-LRA tahun 2019 adalah sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Nihil		

1. Pendapatan Pajak Daerah

Selisih antara Pendapatan pajak-LO dengan pendapatan pajak-LRA tahun 2019 adalah sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Nihil		

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan piutang tahun 2019
.....
Dst ...

Rp

Pengurangan atas pembayaran piutang tahun sebelumnya
.....)
Dst ...
Jumlah
.....

(Rp

Rp

Penambahan dan pengurangan piutang pajak tahun 2019 untuk masing-masing jenis pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.	Jenis Pajak	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)
1	Pajak Hotel		
2	Pajak Restoran		
3	Pajak Hiburan		

4	Pajak Reklame		
5	PPJ PLN		
6	Pajak Parkir		
7	Pajak Air Tanah		
8	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan		
9	Pajak Bumi dan Bangunan		
JUMLAH			

2. Pendapatan Retribusi Daerah

Selisih antara pendapatan retribusi-LO dengan pendapatan retribusi-LRA tahun 2018 adalah sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Nihil		

yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penambahan piutang tahun 2019 :

- Piutang Rp
 - Piutang Rp
 Jumlah Penambahan Rp

- Pengurangan atas pembayaran piutang tahun sblmnya Rp
 - Pengurangan atas pendapatan diterima dimuka Rp
 Dst
 Jumlah Pengurangan Rp
 Jumlah Rp

Pengurangan atas pendapatan diterima di muka adalah pengurangan atas pendapatan yang telah disetorkan atasuntuk jangka waktu tahun terhitung mulai sampaidengan

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Nihil		

Selisih sebesar antara pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada LO dengan LRA merupakan pembayaran atasdan telah diakui sebagai pendapatan LO pada tahun

4. Lain-lain PAD yang Sah

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Nihil		

Selisih sebesar Rp antara Lain-lain PAD yang Sah-LRA dengan Lain-lain PAD yang Sah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan :

Penambahan atas piutang..... tahun 2019
dst Rp

Pengurangan :

Pengurangan atas pembayaran piutang	(Rp
Pengurangan atas piutang TGR	(Rp
Pengurangan atas denda kegiatan tahun	(Rp
dst	

B. PENDAPATAN TRANSFER

Selisih Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional dan LRA adalah sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Nihil		

1. Dana Bagi Hasil Pajak

Selisih antara Dana Bagi Hasil Pajak-LO dengan Dana Bagi Hasil Pajak-LRA sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Nihil		

Selisih tersebut merupakan

2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Terdapat selisih antara pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak-LO dengan pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak-LRA sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Nihil		

Selisih tersebut merupakan

3. Dana Alokasi Umum

Terdapat selisih antara pendapatan Dana Alokasi Umum-LO dengan pendapatan Dana Alokasi Umum-LRA sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Nihil		

Selisih tersebut merupakan

4. Dana Alokasi Khusus

Terdapat selisih antara pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO dengan pendapatan Dana Alokasi Umum-LRA sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Nihil		

Selisih tersebut merupakan

5. Dana Otonomi Khusus

Terdapat selisih antara pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO dengan pendapatan Dana Alokasi Umum-LRA sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Nihil		

Selisih tersebut merupakan

6. Dana Penyesuaian

Terdapat selisih antara pendapatan Dana Penyesuaian-LO dengan pendapatan Dana Penyesuaian-LRA sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Selisih tersebut merupakan

7. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Terdapat selisih antara pendapatan Dana Penyesuaian-LO dengan pendapatan Dana Penyesuaian-LRA sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Selisih tersebut merupakan

8. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya

Terdapat selisih antara pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya-LO dengan pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya -LRA sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Selisih tersebut merupakan

9. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya

Terdapat selisih antara pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya-LO dengan pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya -LRA sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Selisih tersebut merupakan

C. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

1. Pendapatan Hibah

Terdapat selisih antara pendapatan hibah-LO dengan pendapatan hibah-LRA Rp 163.073.475

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
163.073.475	0	163.073.475

--	--	--

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penambahan :

Dropping persediaan dari	Rp
Hibah aset tetap dari Bank Indonesia Corner	Rp 81.824.700,00
Hibah aset tetap dari Perpustakaan Provinsi	Rp. 81.248.775,00
Penambahan dari pihak ketiga	Rp
Pengurangan	
(Rp.....)	

Jumlah Rp

2. Pendapatan Lainnya

Terdapat selisih antara pendapatan lainnya-LO dengan pendapatan lainnya-LRA Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penambahan	Rp
Pengurangan	(Rp
Jumlah	Rp

D. SURPLUS NON OPERASIONAL

1. Surplus Penjualan Aset

Surplus penjualan aset non lancar sebesar Rp..... merupakan penjualan atas aset yang dapat dirinci sebagai berikut :

No	Keterangan	Nilai
		(Rp)
Jumlah		

2. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp. 469.201.594 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Keterangan	Nilai
		(Rp)

1.	Surplus Mutasi Persediaan antar SKPD - LO	469.201.594,00
Jumlah		469.201.594,00

3.2.2 Pengungkapan Perbedaan Beban LO dengan Belanja-LRA

3.2.2.1 BELANJA OPERASI

1. Belanja Pegawai

Terdapat selisih antara Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai
Rp 4.029.875

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
2.323.980.045	2.328.009.920	(4.029.875)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
	Belanja Pegawai LRA	2.328.009.920
	Penambahan :	42.670.125
	Utang TPP Desember 2019 yang belum dibayar	42.670.125
	Pengurangan :	46.700.000
	Utang TPP th 2018 yang dibayar pada th 2019	46.700.000
	Beban Pegawai LO	2.323.980.045

2. Belanja Barang dan Jasa

Terdapat perbedaan nilai beban barang dan jasa pada LO dengan nilai belanja barang dan jasa pada LRA sebesar Rp **346.532.118** dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Beban/Belanja	LO	LRA	Selisih
1	Beban/Belanja Persediaan	505.302.900	505.291.900	11.000
2	Beban/Belanja Jasa	657.932.844	657.963.775	- 30.931
3	Beban/Belanja Sewa			-
4	Beban/Belanja Perjalanan Dinas	348.036.472	348.036.472	-

5	Beban/Belanja Pemeliharaan	170.060.502	170.060.502	-
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	345.315.404		345.315.404
7	Beban Lain-lain	1.236.645		1.236.645
				-
Jumlah		2.027.884.767	1.681.352.649	346.532.118

- 1) Selisih antara beban persediaan dengan belanja persediaan senilai Rp 11.000 terdiri atas :

Penambahan :

Saldo awal persediaan 2019	Rp 1.255.000
Belanja Modal yang menambah nilai persediaan	Rp
Persediaan dari Hibah Pihak III	Rp
Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa Lainnya	Rp
Dst	

Pengurangan :

Saldo akhir persediaan 2019	Rp 1.244.000
Belanja persediaan yang di kapitalisasi ke Aset tetap	Rp
Mutasi Tambah Nilai Persediaan tahun sebelumnya	Rp
Jumlah	Rp 11.000

- 2) Selisih antara beban jasa di LO dengan Belanja Jasa di LRA senilai Rp 30.931 terdiri atas :

Penambahan :

- Beban jasa yang belum terbayar sampai dengan akhir tahun 2019	Rp 7.426.713,00
- Beban Barang BOS	Rp
- Beban yang masih belum terbayar sampai dengan akhir tahun	Rp
- Perbedaan Pengakuan antara LO dan LRA	Rp
- Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan	Rp
- Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa Lainnya	Rp

Pengurangan

- Belanja Jasa yang di Kapitalisasi ke Aset Tetap (Rp)
- Pembayaran utang jasa tahun sebelumnya yang telah dibayar (Rp 7.457.644,00)
- Jumlah Rp 30.931

3) Selisih antara beban sewa-LO dengan belanja Sewa-LRA senilai Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

merupakan tambahan belanja Non APBD yaitu

4) Selisih antara beban perjalanan dinas di LO dengan belanja perjalanan dinas di LRA sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

merupakan

5) Selisih antara beban pemeliharaan di LO dengan belanja pemeliharaan di LRA senilai Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

terdiri atas :

Penambahan :

- Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa Lainnya Rp

Pengurangan :

- Belanja Pemeliharaan yang di Kapitalisasi ke aset Tetap (Rp)
- Belanja pemeliharaan yang menambah saldo persediaan (Rp)
- Reklasifikasi ke Beban Jasa (Rp)
- Jumlah Rp

6) Selisih antara beban makanan dan minuman di LO dengan belanja makanan dan minuman di LRA senilai Rp terdiri dari :

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Penambahan :

- Beban yang belum terbayar sampai akhir tahun Rp
- Belanja Non APBD dari Rp
- Reklasifikasi dari beban barang dan jasa lainnya Rp
- Dst ...

Pengurangan :

- Pembayaran utang tahun sebelumnya Rp
- Dst ...
- Jumlah Rp

7) Selisih antara beban barang dan jasa lainnya di LO dengan belanja barang dan jasa lainnya di LRA senilai Rp..... terdiri dari :

- Reklasifikasi dari ke Beban Rp
-
- Reklasifikasi dari ke Beban Rp
-
- Dst
- Jumlah Rp
-

3. Belanja Hibah

Belanja hibah pada Laporan Realisasi Anggaran memiliki perbedaan nilai dengan beban hibah pada Laporan Operasional yakni sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Selisih tersebut merupakan

4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp..... memiliki perbedaan nilai dengan Beban Bantuan Sosial pada Laporan Operasional yakni sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Selisih tersebut merupakan

5. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp..... memiliki perbedaan nilai dengan Beban Bantuan Keuangan pada Laporan Operasional yakni sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Selisih tersebut merupakan

6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan Amortisasi hanya diakui pada Laporan Operasional dan tidak dicatat pada Laporan realisasi Anggaran yakni sebesar Rp 345.315.404

7. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang hanya diakui pada Laporan Operasional dan tidak dicatat pada Laporan realisasi Anggaran yakni sebesar Rp.....

8. Beban Lain – lain

Beban lain - lain hanya diakui pada Laporan Operasioanl dan tidak dicatat pada laporan realisasi anggaran yakni sebesar Rp. 1.236.645

9. Belanja Tak Terduga

3.2.2.2 TRANSFER

Belanja Transfer pada Laporan Realisasi Anggaran terealisasi sebesar Rp.....

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

3.2.2.3 KEGIATAN NON OPERASIONAL**A. DEFISIT PENJUALAN ASET NON LANCAR**

Defisit ini merupakan defisit atas Penghapusan Aset Tetap yang hanya dicatat pada Laporan Operasional dan tidak dicatat pada LRA yakni sebesar Rp

B. DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Defisit dari Kegiatan non Operasional Lainnya hanya dicatat pada Laporan Operasional dan tidak dicatat pada LRA yakni sebesar Rp 469.201.594 yang merupakan defisit karena adanya mutasi persediaan antar SKPD.

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

4.1.1 UMUM

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes merupakan perubahan dari Kantor Data, Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Brebes mempunyai tugas pokok, fungsi kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang kearsipan dan perpustakaan daerah diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting maka diperlukan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes yang handal dengan didukung oleh kualitas dan kuantitas aparatur yang memadai untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan.

4.1.2 ORGANISASI

Struktur Organisasi SKPD Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes, membawahi :

1. Sekretaris
 - a. Kasubag Umum dan Kepegawaian
 - b. Kasubag Program dan Keuangan
2. Kabid Arsip
 - a. Kasi Layanan dan Pemanfaatan Arsip
 - b. Kasi Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan
 - c. Kasi Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
3. Kabid Perpustakaan
 - a. Kasi Pengelolaan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan
 - b. Kasi Layanan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca
 - c. Kasi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

4.1.4 PERSONALIA

SKPD Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes memiliki 36 personil, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Dinas, 3 orang Kepala Bagian/Bidang, 8 orang Kasubag/Kasi, 24 orang staf di mana 12 orang adalah PNS dan 12 orang adalah tenaga kontrak/honorar.

BAB V

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk Tahun Anggaran 2019. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
KABUAPTEN BEREDES

Drs. TATAG KOES ADIANTO,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700503 199101 1 001